

Analisis Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Jawa Timur

Ivana Ardelia Rhomandhonna¹, Kinanthi Putri Ardiemi²

^{1,2}Department of Accounting, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding email: kinanthiputri@uii.ac.id

Abstract

This research aims to examine and analyze the effect of local government characteristics and audit opinions on local government performance. The characteristics of local government in this research are size, wealth level, dependence, capital expenditure, population, number of ASN employees, and number of OPD. The population in this research was the district government in East Java Province in 2015-2017. The sampling method used purposive sampling, and the analysis model used was panel data analysis with Eviews 9. The results of this research indicate that the size of the local government, the level of dependence, capital expenditure, the number of ASN employees, and the number of OPD has a significant positive effect on the performance of local government. The level of wealth and audit opinion has a significant negative effect on the performance of the local government. In contrast, the population does not affect the performance of local government.

Keywords: characteristic, EKPPD, administration performance, local government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja modal, jumlah penduduk, jumlah pegawai ASN, dan jumlah OPD. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan model analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan aplikasi *Eviews 9*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, belanja modal, jumlah pegawai ASN, dan jumlah OPD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kekayaan dan opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata kunci: karakteristik, EKPPD, kinerja penyelenggaraan, pemerintah daerah

I. PENDAHULUAN

Organisasi ialah sebuah kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu (Weber, 2009). Organisasi berdasarkan sektor atau lingkungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi sektor swasta (*private*) dan organisasi sektor publik. Organisasi sektor swasta (*private*) adalah organisasi-organisasi yang dimiliki secara perseorangan atau sekelompok orang dan berorientasi pada profit. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sebenarnya beberapa pelayanan publik dapat dilakukan oleh organisasi sektor swasta, namun fungsi sektor publik dalam hal birokrasi pemerintahan tidak dapat tergantikan oleh organisasi sektor swasta. Contoh organisasi sektor publik adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah yang berprinsip pada asas otonomi. Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.” Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasar asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berdasar Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah bahwa, “Otonomi daerah diarahkan untuk pencapaian sasaran-sasaran berikut: peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah; kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan; untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah; menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.”

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah akan lebih leluasa untuk mengelola dan membuat peraturan yang tentunya bertujuan untuk lebih memajukan daerahnya. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik (T. R. Nugroho & Prasetyo, 2018). Otonomi daerah akan memberikan dampak yaitu masyarakat lebih mudah untuk menyalurkan aspirasinya dan aspirasi tersebut akan dipertimbangkan menjadi sebuah kebijakan oleh pembuat kebijakan yang akan berpihak pada kepentingan masyarakat (Artha dkk, 2015). Meskipun tiap daerah diberi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk mengadakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang sistematis untuk mengukur kinerja atau kemajuan pemerintah daerah.

Untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah, diperlukan sistem pemantauan, evaluasi, dan pengukuran kinerja yang sistematis. Pemerintah pusat mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dengan melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Permendagri No. 73 Tahun 2009 menyatakan, “Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.”

Tujuan dari adanya EKPPD yaitu untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan atau pengelolaan pemerintahan daerah (Suryaningsih & Sisdyani, 2016). Bentuk pelaksanaan EKPPD tahunan meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota secara nasional. Berdasar Permendagri No. 73 Tahun 2009, metode yang digunakan dalam EKPPD adalah menggunakan nilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EKPPD ini berupa nilai atau skor yang diberikan kepada masing-masing daerah di Indonesia dan dapat digunakan sebagai tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang dinilai dengan EKPPD ini, antardaerah dapat berbeda dan dapat berubah setiap tahunnya. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat berupa dukungan dan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah daerah.

Berikut adalah daftar tiga pemerintah daerah provinsi dan 10 pemerintah daerah kabupaten dengan skor EKPPD tertinggi tahun 2016-2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 120-10421 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100-53 Tahun 2018, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional.

Perbedaan kinerja setiap pemerintah daerah kabupaten di Indonesia ini dapat disebabkan karena karakteristik masing-masing pemerintahan daerah tersebut. Suryaningsih & Sisdyani (2016) menyatakan bahwa faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah ialah karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing daerah sebagai pembeda antardaerah. Karakteristik pemerintah daerah ini dapat dilihat dari ukuran pemerintah daerah,

tingkat kekayaannya, tingkat ketergantungannya dengan pemerintah pusat, belanja modal masing-masing pemerintah daerah, jumlah penduduknya, jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (pegawai ASN) yang terdapat di setiap daerah, dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemerintah pusat dalam melaksanakan EKPPD berdasar pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Oleh sebab itu, pemerintah pusat mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Berdasarkan PP RI No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa, “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.”

Selain melakukan EKPPD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melaksanakan pemeriksaan terkait dengan aspek keuangan setiap pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan BPK ini, berupa opini, temuan, dan rekomendasi. Peneliti hanya mengambil salah satu hasil pemeriksaan BPK yaitu opini audit BPK.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setyaningrum & Syafitri (2012) yaitu pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian sebelumnya oleh Suryaningsih & Sisdyani (2016) meneliti karakteristik pemerintah daerah berupa kemakmuran, status daerah, tingkat ketergantungan, dan belanja modal, menggunakan indikator pengukuran kinerja dari skor EKPPD, serta menambahkan variabel opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Aziz (2016) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan belanja daerah, menggunakan indikator pengukuran kinerja dari tingkat efisiensi. Marfiana & Kurniasih (2013) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja daerah, dan ukuran legislatif, menggunakan indikator pengukuran kinerja dari tingkat efisiensi, serta menambahkan variabel hasil pemeriksaan audit berupa temuan audit dan opini audit. Nugroho & Prasetyo (2018) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan belanja daerah, menggunakan indikator pengukuran kinerja dari tingkat efisiensi. Keterbatasan dari penelitian tersebut ialah kesulitan dalam mengakses laporan keuangan daerah kota dan kabupaten di Jawa Timur.

Penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh karakteristik pemerintahan daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Sudarsana & Rahardjo (2013) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan belanja modal pemerintah daerah, menggunakan indikator pengukuran kinerja dari skor EKPPD, serta menambahkan variabel temuan audit. Mustikarini & Fitriyani (2012) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, dan belanja daerah, menggunakan indikator pengukuran kinerja dari skor EKPPD, serta menambahkan variabel temuan audit. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel belanja daerah kurang tepat untuk menunjukkan tingkat pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Artha dkk. (2015) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, belanja modal pemerintah daerah, dan *leverage* pemerintah daerah, menggunakan indikator pengukuran kinerja dari skor EKPPD, serta menambahkan variabel temuan audit. Andani dkk (2019) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, kemakmuran pemerintah daerah, dan belanja modal pemerintah daerah, menggunakan indikator pengukuran kinerja pemerintahan daerah dari skor EKPPD, serta menambahkan variabel opini audit.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional tahun 2016-2018, pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur mendapat skor EKPPD tertinggi sehingga memperoleh peringkat pertama selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, terdapat banyak pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang

mendapat peringkat 10 teratas. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk menjadikan kabupaten di Provinsi Jawa Timur menjadi objek dalam penelitian ini. Variabel karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini, akan diprosikan dengan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja modal, jumlah penduduk, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), dan jumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Skor EKPPD yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Teori Penatalayanan (*Stewardship Theory*)

Teori penatalayanan (*stewardship theory*) dapat dikatakan “kebalikan” dari teori agensi (*agency theory*). Jika dalam teori agensi, manajer sebagai agen dan pemegang kepentingan sebagai prinsipal, maka dalam teori penatalayanan, manajer berperan sebagai *steward* dan pemegang kepentingan sebagai prinsipal. Teori penatalayanan (*stewardship theory*) ini kerap diimplementasikan di organisasi-organisasi publik, seperti instansi-instansi pemerintah. Donaldson & Davis (1991) berpendapat bahwa teori penatalayanan (*Stewardship Theory*) mempunyai model manusia yang berasal dari psikologi organisasi dan sosiologi organisasi. Motivasi manajer dalam teori penatalayanan bukan untuk mencapai kepuasan atau kepentingan individu, namun untuk kepuasan dan kepentingan prinsipal atau organisasi. McClelland & Herzberg et al. mengungkapkan bahwa, “Pemegang peran organisasi termotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan intrinsik melalui keberhasilan melakukan pekerjaan yang secara inheren menantang, untuk menjalankan tanggung jawab dan otoritas, dengan demikian akan mendapatkan pengakuan dari rekan kerja dan pimpinan.” (Donaldson & Davis, 1991)

Raharjo (2007) mendefinisikan teori penatalayanan (*stewardship theory*) sebagai situasi di mana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Teori penatalayanan (*stewardship theory*) mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik (Raharjo, 2007). Masalah mendasar dalam teori penatalayanan (*stewardship theory*) adalah bagaimana menciptakan struktur organisasi yang bisa membantu manajer untuk membuat keputusan dan pilihan-pilihan tindakan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi (Gudono, 2009). Teori penatalayanan (*stewardship theory*) menggambarkan situasi di mana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Sjarif dkk, 2017). Menurut Podrug, teori penatalayanan (*stewardship theory*) memandang bahwa pemerintah sebagai *stewards*/penatalayanan akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif, dan bijaksana bagi kepentingan masyarakat (Sjarif dkk, 2017).

Teori penatalayanan (*stewardship theory*) ini digunakan karena berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu total aset, total pendapatan asli daerah, total dana perimbangan, dan total belanja modal akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai *steward* untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sebagai prinsipal atau pemegang kepentingan.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Size yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai (Kusumawardani, 2012). Dengan ukuran pemerintah daerah yang besar, akan dibutuhkan berbagai inovasi dan membuat pemerintah daerah semakin terpacu dalam berinovasi untuk daerahnya. Inovasi-inovasi tersebut nantinya akan berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian Patrick (2007) menemukan ukuran organisasi berhubungan positif dengan adopsi inovasi. Pemerintah daerah yang mempunyai ukuran yang besar akan dituntut untuk mempunyai kinerja yang lebih baik daripada pemerintah daerah yang mempunyai ukuran kecil (Artha dkk., 2015). Entitas yang memiliki ukuran besar memberikan harapan kepada publik untuk

memberikan kontribusi dan pelayanan yang tinggi (Surepno, 2013). Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*. Dengan jumlah aset atau aktiva yang besar, seharusnya membuat pemerintah daerah semakin bertanggung jawab untuk memberi pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Artha dkk (2015); Budianto (2012); serta Mustikarini & Fitriyasari (2012) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah dengan indikator total aset pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini ialah,

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Pemerintah daerah yang mempunyai tingkat kekayaan yang tinggi akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan tersebut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintah daerah dengan PAD yang besar seharusnya lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerjanya karena mendapat tekanan lebih besar dari masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tinggi akan menunjukkan kepada *stakeholder*-nya bahwa pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi (Puspita & Martani, 2012). Daerah yang memiliki kekayaan tinggi akan mampu meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik sehingga daerah tersebut akan mempunyai kinerja yang baik (Rustiyaningsih & Immanuela, 2014). Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*.

Florida menyatakan bahwa jumlah dan kenaikan PAD berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintahan daerah (Nugroho, 2012). Semakin besar angka PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendayagunakan sumber daya dan potensi yang ada pada kewenangannya (Sari dkk, 2016). Melalui PAD, pemerintah akan mampu secara mandiri menunjang kinerjanya dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Wenny (2012) juga menyatakan, kenaikan PAD akan sangat berpengaruh pada kinerja pemerintahan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Harumiati & Payamta (2014); Mustikarini & Fitriyasari (2012); Qowi & Prabowo (2017); Rustiyaningsih & Immanuela (2014); serta Sudarsana & Rahardjo (2013) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah yang diprosikan dengan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian pengaruh tingkat kekayaan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini ialah,

H2: Tingkat kekayaan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat semakin besar akan memperlihatkan semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya (Andirfa dkk, 2016). Apabila pemerintah daerah masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan mengharapkan pencairan anggaran dana perimbangan, maka hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (penduduk) tidak dapat berjalan dengan maksimal karena belanja aparturnya belum dapat dibiayai oleh pemerintah daerah sendiri. Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *stewardship theory*. Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreativitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan

penerimaan lokal yang lebih efisien (Adi, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Qowi & Prabowo (2017) serta Sudarsana & Rahardjo (2013) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Artha dkk (2015) serta Rustiyaningsih & Immanuela (2014) juga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini ialah,

H3: Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Belanja modal memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena mempunyai masa manfaat dalam jangka panjang untuk memberi pelayanan kepada publik. Belanja modal adalah salah satu langkah pagi pemerintah daerah untuk memberi pelayanan kepada publik (Ardhani, 2011). Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal pemerintah daerah) diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Seperti yang dikemukakan oleh Aziz (2016) bahwa belanja daerah baik itu yang sifatnya rutin maupun belanja modal dan infrastruktur dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*. Semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian dalam hal ini adalah kinerja pemerintah daerah (Nugroho, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa dkk (2016) serta Mulyani & Wibowo (2017) menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Purba menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro (Artha dkk, 2015). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian pengaruh belanja modal pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini ialah,

H4: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Jumlah penduduk yang besar menuntut pelayanan publik yang lebih banyak dan merata. Semakin banyak jumlah penduduk maka partisipasi mereka juga akan tinggi, sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik (Rustiyaningsih & Immanuela, 2014). Semakin banyak penduduk semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah harus bekerja lebih keras dan meningkatkan penyediaan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*. Penelitian oleh Rustiyaningsih & Immanuela (2014) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian pengaruh jumlah penduduk terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini ialah,

H5: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Tugas pegawai aparatur sipil negara (ASN) adalah melaksanakan kebijakan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memberi pelayanan kepada publik dengan profesional dan berkualitas, serta

mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) menyebabkan pekerjaan membutuhkan waktu yang lama karena ketidakseimbangan antara yang dilayani dengan yang memberikan pelayanan (Kusuma, 2013). Semakin banyak pegawai aparatur sipil negara (ASN) akan semakin cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian pengaruh jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini adalah,

H6: Jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Besaran organisasi perangkat daerah (OPD) mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah. Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menunjukkan jumlah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin banyak urusan akan semakin kompleks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin kompleks penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibutuhkan semakin banyak organisasi perangkat daerah (OPD) supaya penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin tertata, semakin terdiferensiasi, tidak ada pengelolaan yang tumpang tindih. Apabila tidak ada pengelolaan yang tumpang tindih, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian pengaruh jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini adalah,

H7: Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Opini tersebut diberikan berdasarkan pada beberapa kriteria yaitu, kesesuaian LKPD dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Komitmen dan motivasi dari semua tingkatan pegawai dari tingkat bawah sampai atas sangat diperlukan, supaya tercipta LKPD dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dengan demikian, apabila semakin baik opini audit yang diberikan BPK, diharapkan akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakatnya. Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*. Penelitian yang dilakukan oleh Andani dkk. (2019) dan Budianto (2012) menunjukkan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian pengaruh opini audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini adalah,

H8: Opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini ialah data keuangan dan non-keuangan seluruh pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 29 kabupaten tahun 2015-2017. Penulis memilih Provinsi Jawa Timur karena Provinsi Jawa Timur memperoleh skor EKPPD tertinggi serta mendapat peringkat pertama selama

tiga tahun berturut-turut. Penulis memilih pemerintah daerah kabupaten karena menurut penulis kabupaten merupakan pemerintah daerah di tingkat bawah yang kinerjanya dapat mewakili pemerintah daerah di atas maupun bawahnya. Penulis juga memilih hanya pemerintah daerah kabupaten tidak dengan pemerintah daerah kota atas dasar kesetaraan karena menurut Marfiana & Kurniasih (2013) kabupaten dan kota mempunyai beberapa perbedaan karakteristik, di antaranya yaitu:

- Aspek luas wilayah: wilayah pemerintah daerah kabupaten terkadang lebih luas daripada wilayah pemerintah daerah kota, sehingga di wilayah pemerintah daerah kabupaten masih terdapat desa-desa yang tertinggal
- Aspek kepadudukan: kepadatan penduduk di wilayah pemerintah daerah kabupaten lebih rendah daripada kepadatan penduduk di wilayah pemerintah daerah kota, sehingga dapat menjadi permasalahan atau keterbatasan untuk pemerintah daerah kabupaten
- Aspek perekonomian: rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pemerintah daerah kabupaten lebih rendah daripada pemerintah daerah kota, akan berimplikasi pada proporsi sumber pendapatan asli daerah.

Sumber Data dan Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel menggunakan metode sampling purposif (*purposive sampling*). Karakteristik-karakteristik yang akan digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah:

- Pemerintah daerah (kabupaten) di Provinsi Jawa Timur yang mendapat skor EKPPD pada tahun 2016-2018
- Pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menyajikan data total aset, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan total pendapatan tahun 2015-2017 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memberikan informasi non keuangan seperti jumlah penduduk, jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara, dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2015-2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan data panel yaitu gabungan dari *cross section* dan *time series*. Data total aset pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, total pendapatan pemerintah daerah, dan total belanja diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015-2017 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data tersebut diperoleh dari *website* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data opini audit BPK diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun 2016-2018. Data jumlah penduduk, jumlah pegawai aparatur sipil negara, dan jumlah organisasi perangkat daerah diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing kabupaten dan catatan atas laporan keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan data skor EKPPD diperoleh dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015-2017.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Sampel

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah Pemerintah Daerah			Jumlah
	2015	2016	2017	
Jumlah populasi	29	29	29	87
Data tidak tersedia/tidak lengkap	(8)	(8)	(8)	24

Jumlah sampel akhir	21	21	21	63
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: Olah data penulis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan *mean*, *median*, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai *minimum* dari variabel dependen kinerja pemerintah (KP) dan variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah (SZ), tingkat kekayaan pemerintah daerah (WH), tingkat ketergantungan pemerintah daerah (DP), belanja modal (EX), jumlah penduduk (POP), jumlah ASN (ASN), jumlah OPD (OPD), dan opini audit (OA).

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	KP	SZ	WH	DP	EX	POP	ASN	OPD	OA
<i>Mean</i>	3.202 478	28.83 973	0.145 207	0.639 270	26.86 955	13.94 310	9.241 634	49.19 048	3.873 016
<i>Maximum</i>	3.592 200	29.49 947	0.328 337	0.745 015	27.59 841	14.76 198	9.745 195	69.00 000	4.000 000
<i>Minimum</i>	2.615 400	28.21 098	0.088 270	0.453 144	26.31 482	13.21 946	8.897 272	37.00 000	3.000 000
<i>Std. Dev.</i>	0.199 895	0.319 434	0.052 997	0.066 297	0.301 552	0.388 776	0.200 167	7.941 027	0.335 630
<i>Observations</i>	63	63	63	63	63	63	63	63	63

Sumber: Olah data *Eviews 9*

Analisis Regresi Data Panel – Pemilihan Model (Teknik Estimasi) Regresi Data Panel

Tabel 3. Hasil Chow Test

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	4.506590	(20,34)	0.0001
<i>Cross-section Chi-square</i>	81.583951	20	0.0000

Sumber: Olah data *Eviews 9*

Hasil *Chow test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas F sebesar 0,0001. Nilai tersebut $< 0,05$, sehingga H_0 ditolak atau menolak *Common Effect Model* dan H_1 diterima atau menerima *Fixed Effect Model*. Sehingga, model regresi yang sesuai dari hasil *Chow test* ini adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. Hasil Hausman Test

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	27.749572	8	0.0005

Sumber: Olah data *Eviews 9*

Hasil *Hausman test* menunjukkan bahwa nilai *P-value* sebesar 0,0005. Nilai tersebut $< 0,05$, sehingga H_0 ditolak menolak *Random Effect Model* dan H_1 diterima atau menerima *Fixed Effect Model*. Sehingga, model regresi yang sesuai dari hasil *Hausman test* ini adalah *Fixed Effect Model*.

Setelah melakukan *Chow test* dan *Hausman test*, mendapatkan hasil bahwa model regresi yang sesuai adalah *Fixed Effect Model*, maka tidak perlu dilakukan *Lagrange Multiplier Test*.

Analisis Regresi Data Panel – Model Regresi Data Panel

Tabel 5. Hasil Perhitungan Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-9.389842	8.229855	-1.140949	0.2619
SZ	0.227895	0.039552	5.761840	0.0000
WH	-2.564934	0.741977	-3.456892	0.0015
DP	0.521001	0.200395	2.599867	0.0137
EX	0.108786	0.022749	4.782057	0.0000
POP	-0.389246	0.473996	-0.821202	0.4173
ASN	0.823665	0.180504	4.563136	0.0001
OPD	0.023363	0.001484	15.74818	0.0000
OA	-0.051051	0.021012	-2.429557	0.0206
<i>Effects Specification</i>				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
<i>Weighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0.936227	<i>Mean dependent var</i>	6.900323	
<i>Adjusted R-squared</i>	0.883708	<i>S.D. dependent var</i>	9.604723	
<i>S.E. of regression</i>	0.116099	<i>Sum squared resid</i>	0.458284	
<i>F-statistic</i>	17.82639	<i>Durbin-Watson stat</i>	2.591084	
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000			
<i>Unweighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0.735454	<i>Mean dependent var</i>	3.202478	
<i>Sum squared resid</i>	0.655382	<i>Durbin-Watson stat</i>	2.725835	

Sumber: Olah data *Eviews 9***Analisis Regresi Data Panel – Pengujian Asumsi Klasik****Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Uncentered</i>	<i>Centered</i>
	<i>Variance</i>	<i>VIF</i>	<i>VIF</i>
SZ	0.015381	19492.64	2.353153
WH	0.720615	26.18349	3.034595
DP	0.218430	137.4369	1.439467
EX	0.015432	16976.81	2.104050
POP	0.037592	11142.78	8.519081
ASN	0.054739	7126.045	3.288406
OPD	3.75E-05	141.8561	3.547255
OA	0.006955	160.1094	1.174606
C	14.27978	21755.64	NA

Sumber: Olah data *Eviews 9*

Berdasarkan nilai *centered* VIF dari semua variabel independen menunjukkan angka < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak mengandung multikolinearitas, dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan antar variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Heteroscedasticity Test: White</i>	
---------------------------------------	--

<i>F-statistic</i>	1.034638	<i>Prob. F(42,20)</i>	0.4832
<i>Obs*R-squared</i>	43.14334	<i>Prob. Chi-Square(42)</i>	0.4222
<i>Scaled explained SS</i>	37.57236	<i>Prob. Chi-Square(42)</i>	0.6656

Sumber : Olah data *Eviews 9*

Nilai *Obs*R-squared* pada penelitian ini sebesar 43,14334 dengan nilai *P-value* sebesar 0,4222. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada model regresi ini tidak mengandung heteroskedastisitas karena nilai *P-value* $\geq 0,05$. Berdasar hal tersebut, dapat diartikan bahwa varian variabel dalam model regresi ini bersifat konstan.

Analisis Regresi Data Panel – Uji Kelayakan (*Goodness of Fit*) – Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Serentak (*F-test*)

Pada tabel 5, menunjukkan hasil dari *Prob(F-statistic)* sebesar 0,000000. Angka tersebut bernilai $< 0,05$, sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikansi Sebagian (*t-test*)

Uji signifikansi sebagian (*t-test*) dilihat dari perbandingan nilai probabilitas (*P-value*) masing-masing variabel independen dengan nilai α (0,05). Apabila nilai *P-value* $< \alpha$, maka variabel independen secara individual berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya, apabila nilai *P-value* $> \alpha$, maka variabel independen secara individual berpengaruh tidak signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Pada tabel 5, menunjukkan hasil bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen (kinerja pemerintah).

Analisis Regresi Data Panel – Uji Kelayakan (*Goodness of Fit*) – Koefisien Determinasi (R^2)

Pada tabel 5 menunjukkan hasil sebesar 0,883708 atau sebesar 88,37%. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen (kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah) dapat dijelaskan sebesar 88,37% oleh variabel-variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu ukuran pemerintah (SZ), tingkat kekayaan (WH), tingkat ketergantungan (DP), belanja modal (EX), jumlah penduduk (POP), jumlah ASN (ASN), jumlah OPD (OPD), dan opini audit (OA). Selebihnya sebesar 11,63%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah

Hipotesis pertama dirumuskan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tabel 5, ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Indikator ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah total aset yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah kabupaten. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian dan sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Andani dkk (2019), Artha dkk (2015), Mustikarini & Fitriyani (2012), dan Budianto (2012) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya total aset yang besar, akan mempermudah pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, akan memacu pemerintah daerah untuk menciptakan inovasi-inovasi, yang nantinya inovasi tersebut dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya total aset juga akan meningkatkan

rasa tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi dan layanan yang memadai kepada masyarakat. Hal tersebut, sesuai dengan teori penatalayanan atau *stewardship theory*.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah

Hipotesis kedua dirumuskan bahwa tingkat kekayaan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tabel 5, tingkat kekayaan pemerintah daerah yang diproksikan dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Hal ini terjadi karena total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki kabupaten di Provinsi Jawa Timur belum maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Khasanah & Rahardjo (2014), bahwa masih rendahnya tingkat kepedulian pajak dan retribusi yang dibayarkan. Di mana pajak dan retribusi tersebut sebagian komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sulitnya pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). Hal tersebut, didukung dengan hasil statistik deskriptif pada penelitian ini bahwa rata-rata total Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebesar 14,52%. Angka tersebut bernilai lebih kecil daripada nilai rata-rata dana perimbangan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Pada penelitian lain oleh Noviyanti & Kiswanto (2016) dijelaskan bahwa tingkat ketergantungan yang rendah terhadap pihak eksternal membuat kurang memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya karena tuntutan dari pihak eksternal juga rendah.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah

Hipotesis ketiga dirumuskan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tabel 5, tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang diproksikan dengan total dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata dana perimbangan kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebesar 63,93%. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan terkait pengaruh tingkat kekayaan, dana perimbangan kabupaten di Provinsi Jawa Timur lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah termotivasi untuk memiliki kinerja penyelenggaraan yang lebih baik karena pengawasan dari pemerintah pusat (Arthadkk, 2015). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aziz (2016) bahwa besarnya dana perimbangan menunjukkan dana yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan teori penatalayanan atau *stewardship theory*.

Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah

Hipotesis keempat dirumuskan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tabel 5, belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini, bahwa semakin besar jumlah belanja modal pemerintah daerah, maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2016), Andirfa dkk (2016), dan

Mulyani & Wibowo (2017). Belanja modal mempunyai masa manfaat dalam jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Peningkatan dalam investasi modal (belanja modal) mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini sesuai dengan teori penatalayanan atau *stewardship theory*.

Pengaruh Jumlah Penduduk Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah

Hipotesis kelima dirumuskan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tabel 5, jumlah penduduk pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiyarningsih & Immanuela (2014). Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naopal dkk (2017) bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan. Meskipun suatu kabupaten mempunyai jumlah penduduk yang tinggi, tidak diikuti dengan skor kinerja penyelenggaraan yang tinggi pula. Hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara konsisten atau stabil, tidak terpengaruh dengan adanya jumlah penduduk yang tinggi ataupun rendah.

Pengaruh Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah

Hipotesis keenam dirumuskan bahwa jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tabel 5, jumlah ASN pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa semakin banyak jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah, maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin banyak jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah akan semakin cepat dan tepat, sehingga meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut, sesuai dengan teori penatalayanan atau *stewardship theory*.

Pengaruh Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah

Hipotesis ketujuh dirumuskan bahwa jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tabel 5, jumlah OPD pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa semakin banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang mempunyai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jumlah banyak dan terdiferensiasi, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin tertata dan tidak ada pengelolaan yang tumpang tindih. Apabila pengelolaan tidak tumpang tindih, akan meningkatkan pelayanan kepada publik. Hal tersebut sesuai dengan teori penatalayanan atau *stewardship theory*.

Pengaruh Opini Audit Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah

Hipotesis kedelapan dirumuskan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tabel 5, opini audit pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sehingga, apabila opini audit meningkat akan mengakibatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurun, begitu pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan. Hal tersebut dapat disebabkan karena pemerintah daerah apabila sudah mendapat opini audit yang tinggi, maka pemerintah daerah merasa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak perlu untuk lebih ditingkatkan. Begitu pula sebaliknya, apabila mendapat opini audit yang rendah, maka pemerintah daerah merasa kinerja penyelenggaraan pemerintahannya harus lebih ditingkatkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, belanja modal daerah, jumlah pegawai ASN pemerintah daerah, jumlah OPD pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah yang diukur dengan skor EKPPD. Sedangkan tingkat kekayaan pemerintah daerah dan opini audit pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah yang diukur dengan skor EKPPD, serta jumlah penduduk pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah yang diukur dengan skor EKPPD.

Berdasar penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan diantaranya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah provinsi pada umumnya dan pemerintah daerah kabupaten khususnya dalam membuat kebijakan dan dalam menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah, agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih baik dan lebih merata; pemerintah daerah lebih meningkatkan dalam memberikan kualitas pelayanan publikasi terkait informasi-informasi yang dapat diakses secara umum baik dalam jaringan maupun luar jaringan; penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan data pada tingkat provinsi atau pada setiap ibukota provinsi; penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan variabel independen lainnya, seperti *gender* pemimpin pemerintah daerah, jumlah DPRD, latar belakang pendidikan pemimpin pemerintah daerah, atau umur administratif pemerintah daerah.

REFERENSI

- Adi, P. H. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan PAD. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, 1–22.
- Andani, M., Sarwani, & Respati, N. W. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 111–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130>
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(3), 30–38.
- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Universitas Diponegoro.
- Artha, R. D., Basuki, P., & MT, A. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal InFestasi*, 11(2), 214–229. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1133>
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *EKSIS*, 11(1), 86–101. Retrieved from <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>
- Budianto, W. (2012). *Pengaruh Opini, Temuan Audit dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2010*. Universitas Indonesia.

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–66.
- Gudono. (2009). *Teori Organisasi*. Yogyakarta: Pencil Press.
- Harumiati, Y., & Payamta. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2011. *ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(2), 75–87. <https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1244>
- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000. (2000). Retrieved from https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fcf0d2fbfd0e/nprt/657/tap-mpr-no-iv_mpr_2000-tahun-2000-rekomendasi-kebijakan-dalam-penyelenggaraan-otonomi-daerah#dasarhukum
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–11.
- Kusuma, D. M. (2013). Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur Dirik Malaga Kusuma. *EJournal Administrasi Negara*, 1(4), 1388–1400.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/10.15294/aaj.v1i1.453>
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1).
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *KOMPARTEMEN*, 15(1), 57–66.
- Mustikarini, W. A., & Fitriyani, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–22.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *ASSETS*, 7(1), 56–68.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 234–247.
- Nugroho, F. (2012). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Diponegoro.
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota di Jawa Timur. *ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27–34. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Patrick, P. (2007). *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government* (The Pennsylvania State University). Retrieved from https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/4828
- Permendagri No. 73 Tahun 2009. (2009). Retrieved from https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produkhukum_detail/1854
- PP RI No. 13 Tahun 2019. (2019). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103890/pp-no-13-tahun-2019>
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda*. <https://doi.org/10.7775/rac.v84.i1.7932>
- Qowi, R., & Prabowo, T. J. W. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–13.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Rustiyaningsih, S., & Immanuela, I. (2014). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. *Widya Warta*, (2).
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon*, 3(1), 679–692.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170.

<https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>

- Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Sudaryo, Y. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–13. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9759>
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Surepno. (2013). *Pengaruh Return on Equity (ROE), Ukuran (Size), dan Kemakmuran (Wealth) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- Suryaningsih, N. M., & Sisdyani, E. A. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1453–1481.
- UU RI No. 23 Tahun 2014. (2014). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Weber, M. (2009). *The Theory of Social and Economic Organization*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=G3TYBu6-4G0C&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(1), 39–51.